

## BAB - III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan 2016. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

**Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat.** Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

**Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.** Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

**Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang,** tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

**Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat.** Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non-energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, *Commodity Price Forecast*). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.

**Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor.** Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di

dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

**Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.** Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.

**Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.** Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bila-teral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*), yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (*Trans Atlantic Trade and Investment Partnership*) yang terdiri dari Amerika dan EU (*European Union*), dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

Dari berbagai tantangan perekonomian nasional, maka di tataran Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa permasalahan juga yang menjadi tantangan kedepan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti :

**Pertama**, ketersediaan energi yang masih menjadi kendala pembangunan daerah, seperti pasokan energy listrik, ketersediaan energy gas serta kelangkaan juga dipasokan LPG bagi masyarakat luas.

**Kedua**, Berimbang dari kondisi global dan nasional, harga komoditas pangan juga menjadi salah satu kendala meningkatkan ekspor Sumatera Utara, yang sebagian besar masih mengandalkan pada penjualan komoditi bahan baku seperti CPO dan karet dan berbagai bahan baku lainnya.

**Ketiga**, Infrastruktur yang menjadi sarana pendistribusian barang dan jasa masih terbatas kapasitas dan kualitasnya, sehingga hal ini berpengaruh pada capaian indeks harga konsumen sebagai representatif dari pergerakan harga komoditi pada tingkatan konsumen.

Dengan berdasarkan masalah tersebut diatas, berikut akan disajikan kebijakan ekonomi makro nasional dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Pada tataran Pemerintah Nasional maka kebijakan pokoknya adalah :

- 1). **Memantapkan perekonomian nasional**  
Perhatian akan ditujukan pada peningkatan investasi, industry pengolahan non migas, daya saing ekspor, peningkatan efektifitas penerimaan Negara, penguatan penyerapan belanja Negara dan pemantapan ketahanan pangan dan energy
- 2). **Menjaga stabilitas Ekonomi**  
Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga komoditi baik migas maupun non migas serta upaya pengendalian arus modal.
- 3). **Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan**  
Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat mengangkat masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan program program yang tepat dan terpadu,

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas dan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen, sementara tahun 2016 sebesar 6,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015, dan sebesar 5,2-5,5 persen serta jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015 serta sebesar 9,00-10,00.

Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi juga akan relative lebih rendah dari capaian tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,01%, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berkisar di 5,85-6,00 persen sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,0-6,25 persen dan tahun 2016 sebesar 5,50-5,75 persen.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Capaian Tahun 2015**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2015–2019 dan disusun pada akhir periode pelaksanaan RPJMN tahun 2010–2014. Kerangka ekonomi makro tahun 2015 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkiraan ekonomi makro tahun 2014, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2015.

Berbeda halnya dengan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sementara tahun 2016 adalah pelaksanaan tahun ketiga RPJMD.

Kondisi ekonomi daerah Sumatera Utara berkaitan langsung dengan kinerja perekonomian global dan nasional, hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati, sebab fluktuasi ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian Sumatera Utara.

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai

menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia.

Pada tahun 2010-2012, kondisi perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis *subprime mortgage* di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian *bailout* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (*The Fed*) yang akan melakukan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana menyetujui anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.

Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro (EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7 persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asia terkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2013

hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen

Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis. Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7.

Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen.

Sementara untuk nasional Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (ii) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen).

*Kedua*, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2013.

*Ketiga*, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu *tapering off* sejak pertengahan tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan *Quantitative Easing* (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu *tapering off* tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012

Ditengah memburuknya (i) perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011; (ii) isu *tapering off* di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013; (iii) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (iv) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (v) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit

perbankan; ekonomi Indonesia masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya disebabkan oleh: (i) turunnya pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,8 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi internasional; (ii) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional.

Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (i) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi; serta (ii) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,2 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,6 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong oleh: (i) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (ii) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (iii) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (ii) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (iii) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen.

Sejak Tahun 2014, perhitungan PDRB Sumatera Utara dan juga Nasional akan mengalami perubahan dari metode lama ke metode baru yang mengikuti Standar System Of National Account (SNA) tahun 2008, melalui kerangka supplay and Use Tables (SUT), hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi antara dua pendekatan PDB/PDRB dan memperkecil perbedaan antara PDB Nasional dan PDRB, selain itu untuk memberikan gambaran perekonomian nasional terkini mulaid ari pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan serta menjadikan data PDB/PDRB agar dapat diperbandingkan secara internasional.

Berikut ini secara aplikatif dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, akan disajikan informasi mengenai perkembangan PDRB secara dua metode yakni metode lama dan metode baru.

Bagi tataran daerah kondisi perekonomian Sumatera Utara masih mengalami tren yang membaik dari sisi agregasi PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2013 PDRB Sumatera Utara berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 403,93 triliun, dan atas dasar harga konstan tahun dasar 2013 sebesar Rp. 351,09 triliun, dengan laju pertumbuhan yang tetap positif disemua sektor, sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha/Sektor**  
**Tahun 2011-2013 (persen)**

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun 2011	Tahun 2012 <sup>*)</sup>	Tahun 2013 <sup>**)</sup>	Sumber Pertumbuhan	
				2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	4,82	4,72	4,00	1,10	0,92
2. Pertambangan dan Penggalian	6,73	2,04	5,48	0,02	0,06
3. Industri Pengolahan	2,05	3,63	4,01	0,76	0,82
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	8,21	2,99	3,95	0,02	0,03
5. Bangunan	8,54	6,78	7,17	0,47	0,50
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,09	7,23	7,78	1,35	1,47
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10,02	8,27	7,60	0,84	0,78
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,61	11,20	8,31	0,88	0,69
9. Jasa-jasa	8,30	7,54	7,13	0,77	0,74
<b>PDRB</b>	<b>6,63</b>	<b>6,22</b>	<b>6,01</b>	<b>6,22</b>	<b>6,01</b>

*Keterangan : \*) Angka sementara  
\*\*) Angka sangat*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013 sumber pertumbuhan tertinggi bagi peningkatan PDRB bersumber dari sector perdagangan, hotel dan restaurant dengan sumbangan pertumbuhannya mencapai 1,47 persen, disusul oleh sector pengangkutan dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Adapun sektor yang memberikan sumber pertumbuhan terendah adalah sector listrik, gas dan air bersih yang memberikan sumbangan sebesar 0,03 persen, disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangan 0,06 persen.

Sementara jika melihat dari sisi besaran PDRB dan kontribusinya pada tahun 2013, dapat disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2  
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor  
Tahun 2012-2013 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan <sup>2000</sup>	
	Tahun 2012 <sup>*)</sup>	Tahun 2013 <sup>**)</sup>	Tahun 2012 <sup>*)</sup>	Tahun 2013 <sup>**)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Pertanian	76 838,11	86 118,60	30 778,67	32 010,15
2. Pertambangan dan Penggalian	4 635,32	5 252,87	1 525,32	1 608,89
3. Industri Pengolahan	77 484,96	87 170,66	27 513,10	28 615,62
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3 150,34	3 430,43	971,99	1 010,40
5. Bangunan	23 595,94	27 934,64	9 348,16	10 018,50
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	67 027,28	77 918,68	25 406,77	27 384,48
7. Pengangkutan dan Komunikasi	32 855,01	38 574,73	13 858,26	14 911,54
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	26 442,21	31 030,23	11 111,51	12 034,81
9. Jasa-jasa	39 061,18	46 502,22	13 947,74	14 942,74
<b>PDRB</b>	<b>351 090,36</b>	<b>403 933,05</b>	<b>134 461,51</b>	<b>142 537,12</b>

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka sementara

<sup>\*\*)</sup> Angka sangat

Dari tabel diatas, diperoleh hasil bahwa PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 403,93 triliun dan dengan harga konstan mencapai Rp. 142,54 triliun, jika menilik dari pertumbuhannya maka berdasarkan harga berlaku terjadi peningkatan besaran nominal PDRB sebesar 15,05 persen, sementara atas dasar harga konstan mencapai 6,01 persen.

Adapun terkait dengan struktur PDRB atas dasar harga berlaku, disampaikan sebagai berikut :



Tabel 3.3  
Struktur PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha/Sektor Tahun 2011-2013  
(persen)

Lapangan Usaha/Sektor	Struktur		
	Tahun 2011	Tahun 2012 <sup>*)</sup>	Tahun 2013 <sup>**)</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian	22,48	21,88	21,32
2. Pertambangan dan Penggalian	1,38	1,32	1,30
3. Industri Pengolahan	22,48	22,07	21,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,94	0,90	0,85
5. Bangunan	6,42	6,72	6,92
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,21	19,09	19,29
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,21	9,36	9,55
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,96	7,53	7,68
9. Jasa-jasa	10,92	11,13	11,51
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Keterangan : \*) Angka sementara*

*\*\*\*) Angka sangat sementara*

Dari data diatas diperoleh hasil bahwa sector industry masih merupakan peringkat pertama dalam hal pemberi kontribusi terhadap PDRB dimana tahun 2013 memberikan sumbangan sebesar 21,58 persen, disusul oleh sector pertanian sebesar 21,32 persen dan sector perdagangan, hotel dan restaurant sebesar 19,29 persen.

Sementara jika merujuk pada capaian Sumatera Utara disbanding dengan 10 Provinsi terbesar yang memberikan sumbangan bagi PDB Indonesia, akan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)  
(persen)

NO	PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB		SHIFT
		2013	2014*)	
1	DKI Jakarta	16.72	16.71	-0.01
2	Jawa Timur	14.87	15.12	0.25
3	Jawa Barat	14.17	14.38	0.21
4	Jawa Tengah	7.96	8.25	0.29
5	Riau	6.96	6.71	-0.25
6	Sumatera Utara	5.35	5.24	-0.11
7	Kalimantan Timur	5.42	5.09	-0.33
8	Banten	3.22	3.22	0.00
9	Sumatera Selatan	3.06	3.07	0.01
10	Sulawesi Selatan	2.39	2.58	0.19
<i>Trw III</i>				

Dari data diatas, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 (triwulan III) naik peringkat dari sebelumnya di tahun 2013 peringkat 7 menjadi peringkat 6 dengan nilai kontribusi terhadap PDB sebesar 5,24 persen, menurun dibanding tahun 2013 sebesar 5,35 persen, akan tetapi penurunan Provinsi Kalimantan Timur lebih besar yakni dari 5,42 persen menurun menjadi 5,09 persen.

Akan tetapi pada tahun 2014 (triwulan IV), posisi Sumatera Utara kembali ke urutan 7 sebab dengan metode baru perhitungan PDRB, maka Kalimantan Timur kembali ke posisi 6 mengalahkan Sumatera Utara, sebagaimana tergambar pada table di bawah ini :

Tabel 3.5  
Provinsi Penyumbang PDB Terbesar di Indonesia (2013-2014)  
(persen)

NO	PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB		SHIFT
		2013	2014*)	
1	DKI Jakarta	16.72	17.05	0.33
2	Jawa Timur	14.87	14.16	-0.71
3	Jawa Barat	14.17	12.93	-1.24
4	Jawa Tengah	7.96	8.47	0.51
5	Riau	6.96	5.95	-1.01
6	Kalimantan Timur	5.42	5.26	-0.16
7	Sumatera Utara	5.35	4.97	-0.38
8	Banten	3.22	4.17	0.95
9	Sumatera Selatan	3.06	2.86	-0.20
10	Sulawesi Selatan	2.39	2.82	0.43
<i>Trw IV</i>				

Bercermin dari pernyataan sebelumnya diatas bahwa akan disampaikan kondisi perekonomian Sumatera Utara dengan metode lama dan metode baru, maka berikut ini akan disajikan kondisi perekonomian Sumatera Utara dengan metode perhitungan baru dengan memakai SNA dan Tahun dasar baru yakni tahun dasar 2010.

Kondisi perekonomian Sumatera Utara secara umum lima tahun terakhir masih dalam kondisi baik, rata-rata masih tumbuh 6 persen dan lebih baik dari capaian nasional, sebagaimana tercermin pada table dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara**  
**dengan Metode Baru (SNA2008) dan Tahun dasar 2010**  
**(persen)**

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	5,88	5,3	4,7	4,4
2	B	Pertambangan dan Penggalian	-	10,72	11,9	26,0	5,3
3	C	Industri Pengolahan	-	3,22	5,6	4,8	3,0
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	-	13,87	-3,0	-3,9	3,7
5	E	Pengadaan Air	-	6,30	5,1	5,7	6,0
6	F	Konstruksi	-	8,46	6,7	7,7	6,8
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	7,13	7,9	5,6	6,9
8	H	Transportasi dan Pergudangan	-	10,24	8,2	7,4	5,7
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	8,52	6,8	7,8	6,5
10	J	Informasi dan Komunikasi	-	9,96	8,8	7,8	7,2
11	K	Jasa Keuangan	-	8,71	10,1	10,0	2,8
12	L	Real Estate	-	9,66	7,0	6,9	6,6
13	M,N	Jasa Perusahaan	-	10,68	6,0	6,7	6,8
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	8,93	2,5	3,3	6,9
15	P	Jasa Pendidikan	-	4,79	4,9	8,3	6,4
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	16,00	10,6	10,8	7,0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	-	9,00	7,8	7,5	7,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			-	6,66	6,45	6,08	5,23

Sumber :BPS Provsu Tahun 2015

Dari data diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan metode lama (2011-2013), dengan perbandingan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Tahun 2011-2013**  
**Dengan Metode lama (Tahun dasar 2000) dan Metode Baru (SNA2008)**  
**dengan Tahun dasar 2010**  
**(persen)**

TAHUN	METODE LAMA	METODE BARU
2011	6,63	6,66
2012	6,22	6,45
2013	6,01	6,08

Sumber :BPS Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu jika melihat besaran nominal agregasi PDRB Sumatera Utara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atas dasar harga berlaku disajikan dalam table dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014**  
**Dengan Metode Baru (SNA2008)**  
**dengan Tahun dasar 2010**  
**(Rp. juta)**

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,561,143.96	96,856,863.79	103,933,114.9	115,194,745.9	121,435,442.7
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3,336,340.26	4,048,821.63	4,848,020.0	6,581,443.7	6,944,808.7
3	C	Industri Pengolahan	70,540,953.80	79,947,917.24	86,171,929.7	93,241,472.5	104,224,003.8
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	501,178.84	643,052.37	641,934.1	586,207.1	514,666.3
5	E	Pengadaan Air	316,551.82	355,925.07	399,026.0	441,816.0	501,060.0
6	F	Konstruksi	38,650,891.30	44,527,253.68	51,426,266.0	60,997,621.4	71,225,774.0
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	56,555,799.54	64,308,761.08	70,891,922.7	78,324,823.4	89,596,998.2
8	H	Transportasi dan Pergudangan	14,101,567.03	16,580,077.93	19,066,202.1	22,990,245.2	25,923,438.0
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,936,756.77	7,874,972.12	9,100,935.8	10,598,775.3	12,283,315.7
10	J	Informasi dan Komunikasi	7,465,664.08	8,103,346.98	8,957,698.9	9,594,390.2	10,287,350.9
11	K	Jasa Keuangan	9,676,981.62	11,195,195.18	13,479,426.2	15,738,019.0	17,155,250.9
12	L	Real Estate	12,814,477.23	15,290,923.39	16,358,719.3	20,078,791.2	22,786,418.7
13	M,N	Jasa Perusahaan	2,711,690.37	3,181,125.34	3,646,330.4	4,224,044.0	4,836,417.7
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,212,993.02	12,990,356.75	14,786,938.0	16,427,959.7	18,832,080.3
15	P	Jasa Pendidikan	6,690,893.89	7,318,570.99	7,938,014.6	8,848,513.7	9,930,056.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,500,421.51	3,044,544.66	3,519,331.3	4,020,161.9	4,604,434.0
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	1,510,932.41	1,769,392.83	1,964,638.7	2,332,953.3	2,690,048.7
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>			<b>331,085,237.47</b>	<b>377,037,101.03</b>	<b>417,120,438.7</b>	<b>470,221,983.6</b>	<b>523,771,565.6</b>

Dari table di atas, diperoleh bahwa berdasarkan atas harga berlaku, PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 58,20 persen dari tahun 2010 yakni dari Rp. 331,09 triliun meningkat menjadi Rp. 523,77 triliun, atau terdapat peningkatan PDRB sebesar Rp. 192,67 triliun.

Adapun kontribusi per kategori dengan memakai metode baru perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Struktur PDRB Sumatera Utara Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014**  
**Dengan Metode Baru (SNA2008) dengan Tahun dasar 2010**  
**(%)**

No	Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
			Total	Total	Total	Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.79	25.42	24.9	24.5	23.2
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.06	1.07	1.2	1.4	1.3
3	C	Industri Pengolahan	21.3	21.2	20.7	19.8	19.9
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
5	E	Pengadaan Air	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
6	F	Konstruksi	11.7	11.8	12.3	13.0	13.6
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.1	17.1	17.0	16.7	17.1
8	H	Transportasi dan Pergudangan	4.3	4.4	4.6	4.9	4.9
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
11	K	Jasa Keuangan	2.9	3.0	3.2	3.3	3.3
12	L	Real Estate	3.9	4.1	3.9	4.3	4.4
13	M,N	Jasa Perusahaan	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
15	P	Jasa Pendidikan	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>			<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Dari data diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB Sumatera Utara, walaupun

kontribusinya semakin menurun, dimana pada tahun 2010 kontribusinya mencapai 25,79 persen, dan terus menurun menjadi hanya sebesar 23,20 persen pada tahun 2014. Adapun kategori penyumbang kedua terbesar bagi PDRB Sumatera Utara adalah Industri pengolahan dimana sama dengan kaegori pertanian sumbangannya juga semakin menurun dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 21,30 persen dan hanya sebesar 19,90 persen pada tahun 2014, sementara kategori ketiga penyumbang PDRB adalah Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dna sepeda motor yang sumbangannya relative stabil, hal ini terlihat dari sumbangannya paa tahun 2010 sebesar 17,1 persen dan pada tahun 2014 juga memberikan sumbangannya sebesar 17,10 persen juga.

Sementara jika melihat kondisi perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2014, berdasarkan data terakhir triwulan IV 2014, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.523.771,57 milyar dan PDRB perkapita mencapai Rp.38,05 juta atau US\$3.205,8.

Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,23 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,04 persen dan jasa kesehatan sebesar 7,00 persen. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%); industri pengolahan (19,90%); serta perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,11%).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,20 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,10 persen; dan konstruksi sebesar 0,82.

Struktur perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV-2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (21,71 persen); industri pengolahan (20,41 persen) dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,14 persen).

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2014 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,26 persen, diikuti konstruksi sebesar 1,05 persen: dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,95 persen.

Adapun untuk Triwulan I 2015 perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 4,78 persen bila dibandingkan dengan triwulan I 2014 (YoY), hal ini melambat bila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2014 yang capaiannya sebesar 5,24 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,25 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 4,91 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2014 (q-to-q) ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2015 meningkat 1,61 persen. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,38 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan

jasa netto sebesar 1,47 persen (ekspor barang dan jasa sebesar 15,89 persen dan impor barang dan jasa sebesar 14,42 persen).

Berdasarkan pendekatan produksi, tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB pada triwulan I 2015 yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,26 persen, industry pengolahan sebesar 19,37 persen serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,58 persen. Dari sisi pengeluaran, diperoleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,17 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 30,99 persen serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,38 persen.

Secara nominal, PDRB Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 138.019,78 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 108.221,57 milyar.

Sementara untuk sisi investasi, dapat disampaikan bahwa realisasi Investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri terus mengalami kondisi berfluktuasi sebagaimana yang disajikan dalam table sebagai berikut ini :

Tabel 3.10  
Kondisi Realisasi Penanaman Modal baik PMA maupun PMDN  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014

TAHUN	PMA		PMDN		Jumlah Investasi (Rp. Juta)
	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp. Juta)	
2012	101	6,194,880.00	55.00	2,970,186.19	9,165,066.19
2013	165	8,519,539.20	90.00	5,068,881.40	13,588,420.60
2014	201	6,389,687.16	86.00	5,231,905.85	11,621,593.01

*Sumber : Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah*

Dari table di atas diketahui bahwa Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 jumlah proyek PMA yang direalisasi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 101 Proyek dengan nilai Investasi sebesar Rp. 6,19 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 165 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 8,52 triliun, akan tetapi pada tahun 2014 walaupun jumlah proyek semakin meningkat menjadi 201 proyek akan tetapi secara Nilai investasi mengalami penurunan dari tahun 2013 menjadi Rp. 6,39 triliun. Sementara berbeda dengan kondisi investasi PMA, jumlah nilai investasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 nilai investasi yang direalisasikan di Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 2,97 triliun, terus meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 5,07 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp. 5,23 triliun pada tahun 2014, akan tetapi memang secara besaran jumlah proyek di PMDN mengalami fluktuasi dari kondisi tahun 2012 sebanyak 55 proyek meningkat menjadi 90 proyek, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi hanya 86 proyek saja.

### 3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Untuk tahun 2015 dan 2016 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap akan terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar pulau Jawa, sementara hal yang menggembirakan adalah akan beroperasinya secara resmi KEK Sei Mangkei pada Pebruari 2015, diawali dengan telah dilakukannya commissioning PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT.UOI) pada tanggal 27 Januari 2015, serta dicanangkannya pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara yang juga telah diakomodir dalam RPJMN Tahun 2015-2019 oleh Bapak Presiden RI, tentunya hal ini akan sangat menggerakkan perekonomian daerah ditopang lagi dengan telah selesainya beberapa pembangkit listrik yang telah di canangkan dua tiga tahun yang lalu seperti PLTU Pangkalan Susu I dan II.

Dari sisi PDRB dari sisi sektoral diharapkan pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan akan tetap terjadi walaupun tidak sepenuhnya dapat optimal sebagaimana yang diproyeksikan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, berikut akan disajikan estimasi besaran PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 dengan metode perhitungan baru :

Tabel 3.11  
Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHB  
Tahun 2015 dan 2016 dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010  
(Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	2015	2016
			Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133,794,982.59	147,415,311.81
2	B	Pertambangan dan Penggalian	8,374,928.11	10,238,349.61
3	C	Industri Pengolahan	115,976,077.30	131,342,907.54
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	523,993.31	533,477.59
5	E	Pengadaan Air	562,039.69	630,439.92
6	F	Konstruksi	83,704,088.33	98,369,044.60
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	101,428,669.11	113,914,538.28
8	H	Transportasi dan Pergudangan	30,713,656.38	36,626,035.23
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,170,184.42	16,457,252.19
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,146,731.92	12,152,167.14
11	K	Jasa Keuangan	19,808,035.55	23,026,841.33
12	L	Real Estate	26,348,744.69	30,638,320.33
13	M,N	Jasa Perusahaan	5,589,405.27	6,570,345.89
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,440,942.42	24,410,512.95
15	P	Jasa Pendidikan	10,961,244.98	12,299,612.99
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,411,594.91	6,485,796.49
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	3,108,313.69	3,569,898.27
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>			<b>593,063,632.67</b>	<b>674,680,852.18</b>

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2015 diestimasikan bahwa PDRB ADHB akan mencapai Rp. 593,06 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 674,68 triliun, atau jika dihitung pertumbuhannya akan bertumbuh sekitar 13,76 persen disbanding tahun 2015.

Tabel 3.12  
 Proyeksi Besaran PDRB Sumatera Utara ADHK  
 Tahun 2015 dan 2016 dengan Motode Baru SNA 2010 dan Tahun Dasar 2010  
 (Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	2015	2016
			Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,462,240.31	114,059,654.40
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5,815,991.44	6,146,921.35
3	C	Industri Pengolahan	83,672,941.19	86,392,311.78
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	569,580.10	586,952.29
5	E	Pengadaan Air	425,011.13	455,654.43
6	F	Konstruksi	55,652,798.38	59,798,931.86
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	79,317,056.14	85,146,859.76
8	H	Transportasi dan Pergudangan	20,654,732.62	22,329,831.43
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,832,456.37	10,496,147.17
10	J	Informasi dan Komunikasi	11,379,223.98	12,539,904.83
11	K	Jasa Keuangan	13,380,696.60	13,725,918.57
12	L	Real Estate	18,374,307.19	19,697,257.30
13	M,N	Jasa Perusahaan	3,861,029.68	4,179,564.62
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,789,296.88	15,713,627.94
15	P	Jasa Pendidikan	9,036,130.17	9,673,177.35
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,079,005.64	4,366,575.54
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	2,187,573.90	2,337,422.71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			442,490,071.71	467,646,713.36

demikian juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 PDRB Sumatera Utara juga akan meningkat dari estimasi tahun 2015 sebesar Rp. 442,49 triliun menjadi Rp. 467,65 triliun, dengan laju pertumbuhan PDRB secara agregat sebesar 5,69 persen.

Adapun dari estimasi pertumbuhan dan kontribusi sektoral PDRB Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13  
 Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara  
 Tahun 2015 dan 2016 Atas Dasar Harga Berlaku  
 Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010  
 (Rp. milyar)

No	Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
			2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)				
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.98	4.20	22.56	21.85
2	B	Pertambangan dan Penggalian	5.95	5.69	1.41	1.52
3	C	Industri Pengolahan	3.75	3.25	19.56	19.47
4	D	Pengadaan Listrik, Gas	3.25	3.05	0.09	0.08
5	E	Pengadaan Air	7.21	7.21	0.09	0.09
6	F	Konstruksi	8.25	7.45	14.11	14.58
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.45	7.35	17.10	16.88
8	H	Transportasi dan Pergudangan	8.1	8.11	5.18	5.43
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.58	6.75	2.39	2.44
10	J	Informasi dan Komunikasi	10.25	10.20	1.88	1.80
11	K	Jasa Keuangan	2.14	2.58	3.34	3.41
12	L	Real Estate	7.25	7.20	4.44	4.54
13	M,N	Jasa Perusahaan	6.52	8.25	0.94	0.97
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.89	6.25	3.62	3.62
15	P	Jasa Pendidikan	6.58	7.05	1.85	1.82
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.25	7.05	0.91	0.96
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	7.58	6.85	0.52	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5.44	5.69	100.00	100.00



Dari tabel di atas, diestimasikan bahwa pada tahun 2015 ini ekonomi Sumatera Utara akan tumbuh 5,44 persen, sementara pada tahun 2016 tumbuh lebih tinggi di kisaran 5,69 persen, adapun secara umum hampir seluruh kategori akan tumbuh positif pada tahun 2015 maupun 2016, dengan ringkasan bahwa pada tahun 2015 sektor yang tumbuh tertinggi adalah informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,25 persen, disusul 2 kategori tertinggi lainnya yakni kategori konstruksi dengan tumbuh sebesar 8,25 persen serta kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,10 persen, adapun yang diproyeksikan pertumbuhannya menurun adalah kategori jasa keuangan yang hanya tumbuh sebesar 2,14 persen dan kategori pengadaan listrik dan gas yang hanya tumbuh sebesar 3,25 persen. Sementara untuk tahun 2016 kategori yang memberikan pertumbuhan tertinggi adalah kategori informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,20, disusul berturut turut kategori jasa perusahaan sebesar 8,25 persen dan kategori transportasi dan perdagangan yang juga tumbuh sebesar 8,11 persen, sementara kategori yang laju pertumbuhannya sedikit melambat adalah kategori jasa lainnya 6,85 persen dibanding tahun 2015 yang tumbuh 7,58 persen, disusul kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 7,45 persen sementara di estimasikan di tahun 2015 kategori ini tumbuh sebesar 8,25 persen.

Sementara jika ditilik dari kontribusi kategorial terhadap PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku kategori pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang pertama yakni sebesar 22,56 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi 21,85 persen pada tahun 2016, adapun kategori lainnya yang menduduki tiga besar adalah kategori Industri pengolahan dimana tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 19,56 persen menurun menjadi 19,47 persen pada tahun 2016, sementara kategori ketiga terbesar yang memberikan kontribusi adalah kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang diharapkan memberikan sumbangan pada tahun 2015 sebesar 17,10 persen, dan diestimasikan semakin menurun pada angka 16,80 persen pada tahun 2016.

Adapun jika dilihat dari sisi sudut penggunaan PDRB, di estimasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi sumber PDRB yang utama di Provinsi Sumatera Utara pada tahun estimasi 2015 dan tahun 2016, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14  
 Proyeksi Nilai PDRB Sumatera Utara  
 Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan  
 Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010  
 (Rp. milyar)

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
	2015	2016	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	325,818,240.42	369,314,975.52	226,333,671.68	239,154,529.21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,549,382.24	6,009,426.03	4,734,643.77	5,377,937.20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	46,681,997.71	52,984,067.40	32,523,020.27	34,418,798.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	186,658,930.62	210,831,262.13	131,109,808.25	140,761,660.72
5. Perubahan Inventori	5,892,901.92	6,041,403.05	3,982,410.65	4,676,467.13
6. Ekspor Luar Negeri	199,658,549.08	219,064,393.96	194,695,631.55	206,232,200.59
7. Impor Luar Negeri	177,196,369.33	189,564,675.91	150,889,114.45	162,974,879.61
<b>P D R B</b>	<b>593,063,632.66</b>	<b>674,680,852.18</b>	<b>442,490,071.71</b>	<b>467,646,713.36</b>

Pada tahun 2016 nilai PDRB ADHK 2010 Sumatera Utara diestimasikan akan mencapai Rp. 467,65 triliun dan berdasarkan atas dasar harga berlaku akan mencapai nilai Rp.

674,68 triliun, tentunya hal ini akan sangat tergantung pada kebijakan pembangunan pemerintahan atasan dimana telah ditetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

Tabel 3.15  
 Proyeksi Laju pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sumatera Utara  
 Tahun 2015 dan 2016 Menurut Sudut Penggunaan  
 Atas Dasar Harga Berlaku Maupun Atas dasar Harga Konstan 2010  
 (Rp. milyar)

Komponen Pengeluaran (1)	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
	2015	2016	2015	2016
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>4.96</b>	<b>5.66</b>	<b>51.15</b>	<b>51.14</b>
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>4.43</b>	<b>13.59</b>	<b>1.07</b>	<b>1.15</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>5.74</b>	<b>5.83</b>	<b>7.35</b>	<b>7.36</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>5.67</b>	<b>7.36</b>	<b>29.63</b>	<b>30.1</b>
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>(7.17)</b>	<b>17.43</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>
<b>6. Ekspor Luar Negeri</b>	<b>5.20</b>	<b>5.93</b>	<b>44</b>	<b>44.1</b>
<b>7. Impor Luar Negeri</b>	<b>4.27</b>	<b>8.01</b>	<b>34.1</b>	<b>34.85</b>
<b>P D R B</b>	<b>5.44</b>	<b>5.69</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa pada tahun 2016 PDRB Sumatera Utara akan tumbuh sebesar 5,69% dengan laju pertumbuhan tertinggi ada pada perubahan inventori dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit masing masing memberikan laju pertumbuhan sebesar 17,43 persen dan 13,59 persen, sementara itu dari sisi kontribusi konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi PDRB Sumatera Utara dengan estimasi raihan pada tahun 2014 mencapai 51,14 persen, disusul oleh ekspor luar negeri sebesar 44,10 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 34,85 persen. Adapun untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto akan menjadi semakin berpengaruh terhadap PDRB dimana terjadi kenaikan kontribusi yang destimasi di tahun 2016 sebesar 30,10 persen meningkat bila dibandingkan dengan estimasi 2015 sebesar 29,63 persen.

Dari sisi volume perdagangan luar negeri, Sumatera Utara diharapkan akan dapat lebih meningkatkan daya saing produk ekspor, hal ini sejalan juga dengan sasaran Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas :

- 1) Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun;
- 2) Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun;
- 3) Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Adapun arahan kebijakan untuk peningkatan ekspor yang juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain diwujudkan dengan meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi pembangunan untuk mendorong pengembangan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi dan berdaya saing di pasar global termasuk yang melalui titik lintas batas di daerah perbatasan, agar dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian

nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia. Untuk itu, pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi akan dititikberatkan pada: produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam, produk olahan hasil tambang, serta produk olahan hasil pertanian/perikanan.

- 2) Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan pencitraan, penetapan harga produk yang lebih bersaing, serta pengembangan layanan berstandar internasional
- 3) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas melalui upaya: (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi *roadmap* sektor jasa; (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi perkembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor; (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa; (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa; (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa; serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat. Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi: (a) jasa pendorong ekspor nonmigas, yaitu: jasa transportasi, jasa pariwisata, dan jasa konstruksi; serta (b) jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing
- 5) Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor
- 6) Mengembangkan keragaman aktivitas dan mekanisme promosi ekspor yang lebih efektif untuk meningkatkan citra produk Indonesia di pasar global, yang antara lain melalui: (i) penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment (TTI)*; (ii) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu; serta (iii) peningkatan peran kantor perwakilan dagang di luar negeri agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara
- 7) Meningkatkan pengelolaan impor yang efektif untuk: (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas. Hal ini dilakukan melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, serta melakukan upaya harmonisasi kebijakan impor; (ii) meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik; serta (iii) mengatasi impor ilegal, termasuk di daerah perbatasan yang telah menjadi kawasan pabean
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas *safe guards* dan pengamanan perdagangan lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*)

- 9) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Agreements* (FTA) yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas *safe guard* untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional. Strategi ini secara rinci dijabarkan dalam bagian tentang Meminimalisasi Dampak Globalisasi Ekonomi

Dengan prospek perekonomian tersebut diatas, maka diharapkan sasaran-sasaran makro ekonomi Sumatera Utara akan tetap dapat tercapai untuk peningkatan pembangunan Sumatera Utara, akan tetapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sasaran-sasaran makro ekonomi harus diantisipasi, adapun beberapa tantangan tersebut antara lain :

- 1). Mulai diberlakukannya *The ASEAN Community* pada tahun 2015 (Desember tanggal 31). Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
- 2). Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, (b) perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor mau-pun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek; dan
- 3). Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: (a) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) proses normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.

Untuk tahun 2015 dan 2016 diharapkan pertumbuhan ekspor Sumatera Utara akan meningkat, dengan peningkatan utamanya diharapkan dari ekspor non migas, sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16  
 Nilai Ekspor dan Impor Sumatera Utara Tahun 2013 dan 2014  
 Serta Proyeksi Tahun 2015 dan 2016  
 (US \$.000)

TAHUN	NILAI		
	EKSPOR	IMPOR	NERACA
2013	9,597,907.00	5,108,737.00	4,489,170.00
2014*)	8,681,165.00	4,623,645.00	4,057,520.00
2015**)	10,750,120.00	5,550,000.00	5,200,120.00
2016	10,100,000.00	5,400,000.00	4,700,000.00
<i>Catatan : *) Data Agregat s/d Nopember 2014</i>			
<i>***) Proyeksi RKPD Provsu Tahun 2015</i>			

Dari tabel di atas, diestimasikan bahwa pada tahun berjalan ini nilai ekspor Sumatera Utara yang sebesar US\$ 10,75 milyar tidak dapat tercapai, sebab capaian untuk tahun

2014 saja sampai bulan Nopember 2014 hanya sebesar US\$ 8,68 milyar, dan jika diakumulasi sampai dengan tahun 2014 Desember paling tinggi US\$ 9,45 milyar, bahkan capaiannya akan lebih rendah dari tahun 2013. Hal yang berbeda diestimasikan akan terjadi peningkatan nilai ekspor tahun 2016 yang diproyeksikan akan kembali mencapai double digit di kisaran US\$ 10,10 milyar, hal ini imbas dari telah beroperasinya secara resmi PT. Unilever Oleochemical Indonesia serta akan bertambahnya produksi dari PT. Inalum serta permintaan komoditas ekspor dunia yang akan semakin baik di tengah terpuruknya harga minyak dunia.

Selain itu juga estimasi ini sejalan dengan sasaran kinerja perdagangan luar negeri nasional, yang di sampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17  
Perkiraan Neraca Pembayaran  
(US \$.000)

Indikator	Perkiraan 2014	Proyeksi	
		2015	2016
<b>Ekspor</b>			
Migas	32.9	32.3	32.6
Non Migas	145.2	156.7	172.2
(Pertumbuhan, %)	-1.0	8.0	9.9
<b>Impor</b>			
Migas	-46.1	-48.9	-51.7
Non Migas	-131.6	139.6	149.5
(Pertumbuhan, %)	-1.0	6.1	7.1

Sumber : Bappenas RI, 2015

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang disajikan sebagai berikut :

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

## 1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

### 1). Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2016 diproyeksikan akan mengalami penurunan dari APBD provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2016 diproyeksikan tidaklah sebaik capaian tahun 2011-2013 yang rata-rata di atas, 6,27 persen, sementara untuk tahun 2016 hanya diestimasikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen.
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14 persen tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 85,35%;
- c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah yang semakin membesar seiring dengan peningkatan besaran cukai yang ditetapkan Pemerintah dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 5,00 persen per tahun.
- d. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Anggaran 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru, serta adanya operasi penertiban terhadap pelanggaran pembayaran pajak .

### 2). Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diproyeksikan menurun sebesar 13,33 persen, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2012-2014) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,79 persen;
- b. Realisasi rata-rata target terhadap realisasi tahun 2012-2014 hanya sebesar 93,17 persen;
- c. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014

### 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 diproyeksikan rata-rata sebesar 2,03% per tahun

- b. Berkurangnya pos dana annual fee mulai tahun 2014 dari sumbangan PT. Inalum yang sejak tahun 2014 telah resmi menjadi BUMN, sehingga MOA yang mengatur tentang annual fee secara otomatis akan tidak berlaku lagi.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam tabel :

Tabel 3.18  
Tabel Proyeksi/Target Pendapatan  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015 (Rp.)	APBD TA. 2016 (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>1. 1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5,257,668,172,609</b>	<b>5,187,378,800,764</b>	<b>(70,289,371,845)</b>	<b>(1.34)</b>
1. 1 1	Fajak Daerah	4,743,736,523,209	4,627,439,750,764	(116,296,772,445)	(2.45)
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,527,067,106,961	1,620,774,551,823	93,707,444,862	6.14
	Pajak Kendaraan di Air (PKA)	60,000,000,000	60,000,000,000	0	(100.00)
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	1,669,326,902,498	1,507,665,198,941	(161,661,703,557)	(9.68)
	Bea Balik Nama Kendaraan di Air (BBN KA)	0	0	0	#DIV/0!
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	910,310,000,000	865,000,000,000	(45,310,000,000)	(4.98)
	Pajak rokok	877,032,913,790	842,000,000,000	(35,032,913,790)	(1.74)
	Pajak Air Bawah Tanah & Air Permukaan	0	67,000,000,000	67,000,000,000	#DIV/0!
	- ABT	0	0	0	#DIV/0!
	- APU	0	0	0	#DIV/0!
1. 1 2	Retribusi Daerah	83,519,774,100	74,819,550,000	(8,700,224,100)	(10.42)
	Retribusi Jasa Umum	70,937,008,000	66,806,000,000	(4,131,008,000)	(5.82)
	Retribusi Jasa Usaha	12,332,766,100	7,803,550,000	(4,529,216,100)	(36.73)
	Retribusi Perizinan Tertentu	250,000,000	210,000,000	(40,000,000)	(16.00)
	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa	0	0	0	#DIV/0!
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0	0	0	#DIV/0!
1. 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	282,309,000,000	289,300,000,000	6,991,000,000	2.48%
	Perusahaan Daerah :		22,280,000,000	22,280,000,000	#DIV/0!
	PDAM TIRTANADI	0	0	0	#DIV/0!
	PD PERKEBUNAN	20,000,000,000	20,000,000,000	0	-
	PD PERHOTELAN	360,000,000	180,000,000	(180,000,000)	(50.00)
	PD AU	80,000,000	0	(80,000,000)	(100.00)
	Jasa Gra	2,100,000,000	2,100,000,000	0	0
	PT KIM	259,799,000,000	143,573,000,000	(116,226,000,000)	(44.74)
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	148,102,875,300	195,819,500,000	47,716,624,700	32.22
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2,200,000,000	38,610,000,000	36,410,000,000	1,655.00
	Jasa Gra	43,540,300,000	77,350,000,000	33,809,700,000	117.24
	Pendapatan Bunga	0	0	0	#DIV/0!
	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0	0	#DIV/0!
	Komis, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0	0	0	#DIV/0!
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	75,999,363,000	91,268,500,000	15,269,137,000	20.09
	Pendapatan Denda Pajak(1)	0	0	0	#DIV/0!
	Pendapatan Denda Retribusi(1)	0	0	0	#DIV/0!
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	#DIV/0!
	Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0	#DIV/0!
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	28,610,782,300	77,171,500,000	48,560,717,700	169.73
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5,732,530,000	5,000,000,000	(732,530,000)	(12.78)
	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0	0	0	#DIV/0!
1. 2	Dana Perimbangan	1,838,572,481,691	2,549,382,694,651	710,810,212,960	38.66
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	489,440,205,691	981,837,191,051	492,396,985,360	100.60
	Bagi Hasil Pajak	460,776,894,435	496,273,386,000	35,496,491,565	7.70
	PBB	0	0	0	#DIV/0!
	BPHATB	0	0	0	#DIV/0!
	WPOPDN (PPH pasal 25 dan pasal 29) digabung dengan PPh pasal 21	0	0	0	#DIV/0!
	PPh pasal 21	0	0	0	#DIV/0!
	Alokasi Biaya Pemungutan PBB	0	0	0	#DIV/0!
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28,663,311,256	485,563,805,051	456,900,493,795	1,594.03
	1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	0	#DIV/0!
	2. Provisi SDH	0	0	0	#DIV/0!
	3. Dana Reboisasi	0	0	0	#DIV/0!
	4. Iuran Tetap (Land Rent)	0	0	0	#DIV/0!
	5. Iuran Eksplorasi & eksploitasi (Royalti)	0	0	0	#DIV/0!
	6. Pungutan Hasil Perikanan	0	0	0	#DIV/0!
	8. Pertambangan Minyak Bumi	0	0	0	#DIV/0!
	9. Pertambangan Gas Bumi	0	0	0	#DIV/0!
	10. Pertambangan Panas Bumi	0	0	0	#DIV/0!
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	1,349,132,276,000	1,484,045,503,600	134,913,227,600	10.00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	0	83,500,000,000	83,500,000,000	#DIV/0!
	1. Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan	0	0	0	#DIV/0!
	2. Dana alokasi khusus Infrastruktur Irigasi	0	0	0	#DIV/0!
	3. Dana alokasi khusus Kesehatan Pelayanan Rujukan	0	0	0	#DIV/0!
1. 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,578,596,636,800	1,779,200,163,800	200,603,527,000	12.71
1. 3 1	Hibah	38,083,696,800	89,200,163,800	51,116,467,000	134.22
	01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0	0	0	#DIV/0!
	- Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi PNSD	0	0	0	#DIV/0!
	- Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	#DIV/0!
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	0	0	#DIV/0!
	02. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	#DIV/0!
	03. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	#DIV/0!
	04. Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan	0	0	0	#DIV/0!
	- Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	#DIV/0!
	05. Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	0	0	0	#DIV/0!
	- Annual Fee	0	0	0	#DIV/0!
1. 3 2	Dana Darurat	0	0	0	#DIV/0!
1. 3 3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	#DIV/0!
1. 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,540,512,940,000	1,690,000,000,000	149,487,060,000	9.70
	Dana Insentif Daerah	0	0	0	#DIV/0!
	Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah	0	0	0	#DIV/0!
1. 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	#DIV/0!
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8,674,837,291,100</b>	<b>9,515,961,659,215</b>	<b>841,124,368,115</b>	<b>8.84%</b>

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2015 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.674.837.291.100,-



yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.257.668.172.609,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.838.572.481.691,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.1.578.596.636.800,-.

Sedangkan pada tahun 2016 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.987.254.097.764,- Dana Perimbangan diperkirakan akan menurun menjadi Rp. 1.593.847.269.500,-, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 1,19%% menjadi Rp. 1.710.349.808.500,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2016 adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 4.331.136.448.764,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 74.819.550.000,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 165.853.000.000,- sedangkan penerimaan lainnya diharapkan bersumber dari deposito yang pelaksanaan dan besarnya masih belum dapat diprediksi, demikian juga bagi hasil perkebunan (pengusulan bagi hasilnya terus akan menjadi prioritas daerah) dan bagi hasil dari laba yang dikelola sebagai hasil operasional BUMN seperti PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah.

Selain itu, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2015 yang sebesar Rp.1.349.132.276.000,- atau diperkirakan menurun sebesar 10,55% menjadi Rp. 1.139.261.371.000,-, hal kontraksi akan berbeda dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang akan diestimasikan menurun, sebagai akibat realisasinya di tahun sebelumnya tidak tercapai, diperkirakan akan menurun sekitar -10,24% menjadi Rp. 365.186.386.000,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diperkirakan sebesar Rp. 65.109.382.500,-. Sama seperti rencana tahun anggaran 2014. Dengan demikian kapasitas sumber penerimaan untuk anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan pada tahun 2016 akan mencapai Rp. 7,9 triliun.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2016, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1). Belanja Pegawai**

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2016 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b. biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan

penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2016 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional.
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## 2). Belanja Hibah

Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti BPS, KODAM, POLDA, KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

## 3). Belanja Bantuan sosial

Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala

tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### 4). Belanja Bagi hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2016, sedangkan pelampauan target TA. 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2015, pada tahun 2016 juga akan dibayarkan hutang bagi hasil Kab/Kota yang masih tertunda.

#### 5). Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk :

- a. Infrastruktur;
- b. Revitalisasi pasar tradisional;
- c. Sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Prasarana dan sarana kesehatan;
- e. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan;
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian;

#### 6). Belanja Tidak Terduga

Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016; sedangkan penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sementara untuk kebijakan Belanja Langsung pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 memperhatikan hal-hal khusus, dimana Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *Visi dan Misi RPJMD Provsu Tahun 2013-2018*, dan *MDG's*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
- 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan

pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 meliputi urusan sebagai berikut:

#### **Urusan Wajib**

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Penataan ruang;
- 5) Perencanaan pembangunan;
- 6). Perhubungan;
- 7). Lingkungan Hidup;
- 8). Sosial
- 9). Tenaga Kerja
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 11). Penanaman modal;
- 10) Kebudayaan;
- 10) Pemuda dan Olahraga;

- 11) Keselamatan Bangsa dan Politik dalam negeri;
- 12) Otonomi daerah, Pemerintahan Umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 13) Ketahanan Pangan;
- 14) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 15). Komunikasi dan Informatika;
- 16). Perpustakaan

#### **Urusan Pilihan**

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Kelautan dan Perikanan;
- 5). Industri

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19.  
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2015 s.d tahun 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015	APBD TA. 2016	
		(Rp.)	(Rp.)	
2	BELANJA DAERAH			
2.	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,619,854,577,818	5,164,776,104,869
2.	1	1 Belanja Pegawai	1,174,303,458,135	1,268,247,734,786
		Gaji		
		Tunjangan PNS :		
		TPP		
		Biaya Pemungutan		
		BPO PimpinaN & Anggota DPRD		
		BPO KDH/WKDH		
2.	1	2 Belanja Bunga	0	-
2.	1	3 Belanja Subsidi	0	-
2.	1	4 Belanja Hibah	1,588,169,654,000	1,691,500,000,000
		Pendidikan	0	1,700,512,940,000
		Kesehatan	0	2,500,000,000
		UMKM	0	-
		Lainnnya (keagamaan dan sosial)	0	-
		KPU dan PANWASLU+POLRI		
		BOS	0	-
2.	1	5 Belanja Bantuan Sosial	1,700,000,000	1,700,000,000
		Pendidikan	0	-
		Kesehatan	0	-
		UMKM	0	-
		Lainnnya (keagamaan dan sosial)	0	-
2.	1	6 Belanja Bagi Hasil Kepada Kab./Kot	2,330,828,370,083	1,845,828,370,083
		PKB	0	-
		PKA	0	-
		BBN-KB	0	-
		BBN-KA	0	-
		PBB-KB	0	-
		ABT	0	-
		APU	0	-
		Tera Ulang	0	-
		Retribusi Grosis dan Pertokoan	0	-
2.	1	7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada	517,353,095,600	350,000,000,000
		Infrastruktur	0	245,000,000,000
		Pendidikan (kesra guru + beasiswa)	0	100,000,000,000
		Kesehatan (obat-obatan)	0	5,000,000,000
		Pertanian (agropolitan & agromari)	0	-
		Pasar tradisional & pusat2 perrtum	0	-
		Partai Politik	0	-
2	1	8 Belanja Tidak Terduga	7,500,000,000	7,500,000,000
2	2	BELANJA LANGSUNG	3,060,087,716,282	4,349,394,535,081
2	2	1 Belanja Pegawai	188,229,201,850	128,000,000,000
2	2	2 Belanja Barang dan Jasa	1,477,047,247,934	1,866,318,427,468
2	2	3 Belanja Modal	1,394,811,266,498	2,355,076,107,613
		JUMLAH BELANJA	8,679,942,294,100	9,514,170,639,950
		Surplus/(Defisit)	(5,105,003,000)	1,791,019,265

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- Pencairan dana cadangan.

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada paragraf III tentang Pembiayaan khususnya pasal 300 sampai dengan pasal 305.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. pinjaman Daerah; dan
- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2016 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2015, yang diperkirakan akan berjumlah lebih kurang Rp. ....,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran sementara untuk penyertaan modal diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.7.  
 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 s.d tahun 2016

NOMOR	URAIAN	APBD TA. 2015	APBD TA. 2016
		(Rp.)	(Rp.)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3 1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	5,105,003,000.00	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5,105,003,000</b>	<b>-</b>
3 2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-
	<i>PDAM TIRTANADI</i>	0	0
	<i>PT. KIM</i>	-	-
	<i>PT. PERKEBUNAN</i>	0	0
	<i>PT. SARANA PRASARANA</i>	-	-
	<i>PT. BANK SUMUT</i>	0	
	<i>PD AIJ</i>		
	<i>PD Perhotelan</i>		
	<i>Lainnya</i>	0	-
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok	-	-
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5,105,003,000</b>	<b>-</b>
3 3 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-